

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM  
AKUTANSI KEUANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Empiris pada Kecamatan Kedung Jepara)**

**Skripsi**

**untuk memenuhi sebagai persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**AHMAD WAHIB LUTHFI**

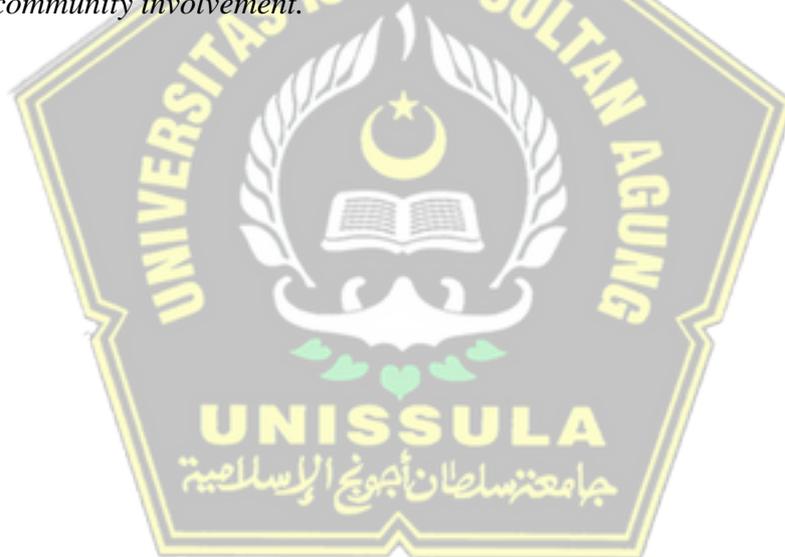
**NIM : 31401900010**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2025**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the influence of accountability, transparency, financial accounting systems, and community participation on village fund management in Kedung District, Jepara Regency. A quantitative approach was used with a survey method by distributing questionnaires to village officials involved in managing village funds. The sample was selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression. The results show that accountability, transparency, financial accounting systems, and community participation simultaneously have a significant effect on village fund management. Partially, accountability and financial accounting systems have a positive and significant influence, while transparency and community participation have a positive but not significant effect. These findings highlight the importance of improving village financial governance through transparent and accountable systems, as well as encouraging active community involvement.*



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM  
AKUNTANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Empiris pada Kecamatan Kedung Jepara)**

**Disusun oleh:**

**Ahmad Wahib Luthfi**

**NIM: 31401900010**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan  
sidang panitia ujian penelitian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Semarang, 23 Mei 2025

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kiryanto', is placed above the printed name of the supervisor.

Prof. Dr. Kiryanto, SE., M.Si., Akt. CA.

NIK. 211492004

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM  
AKUNTANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Empiris pada Kecamatan Kedung Jepara)**

**Disusun oleh:**

**Ahmad Wahib Luthfi**

**NIM: 31401900010**

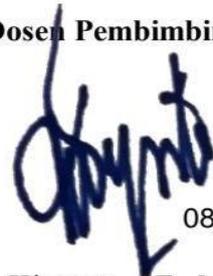
Telah dipertahankan didepan Dosen Review pada tanggal 07 Juni 2025

**Dosen Reviewer**



Prof. Dr. Luluk Muhimmatul Ifada,  
SE., M.Si., Akt. CSRS., CSRA.  
NIK.210403051

**Dosen Pembimbing**



08/06/2025

Prof. Dr. Kiryanto, SE., M.Si., Akt.  
CA.  
NIK. 211492004

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi Tanggal 07 Juni 2025

**Ketua Program Studi Strata 1 Akuntansi**



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D.

NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Wahib Luthfi

NIM : 31401900010

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya penelitian untuk Skripsi dengan judul “PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai dengan etika atau tradisi keilmuan. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 07 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية



Ahmad Wahib Luthfi

NIM. 31401900010

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian Pra Skripsi yang berjudul “ **PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA** ”.Penulis menyadari bahwa selama penyusunan pra skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Akt., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Kiryanto, SE., M.Si., Akt. CA selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Sri Anik, S.E., M.Si. selaku Dosen Wali selama perkuliahan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dosen-dosen dan Staf Karyawan Program Studi Akuntansi yang selama ini telah banyak menyalurkan ilmunya dan bantuannya kepada penulis.
6. Orang tua tercinta, Bapak Drs. H. Faidhul Hakim dan Ibu Drs. Hj. Nur Izzah Almarhumah dan Ibu Nurul Wakhidah, S.Kep.Ns. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Tak lupa terimakasih atas do'a restu yang selalu meniringi perjalanan penulis dari awal hingga saat ini.

7. Keluarga Besar Kakak Farida Fikriyati Faiz, Amd., Keb. Dan kakak Muhammad Aminuddin Najib, S.T. yang memberikan motivasi, dukungan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tugas.
8. Yuly sakinatul Karomah, S.Pd., Gr. Saudara yang memberikan motivasi, dukungan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tugas.

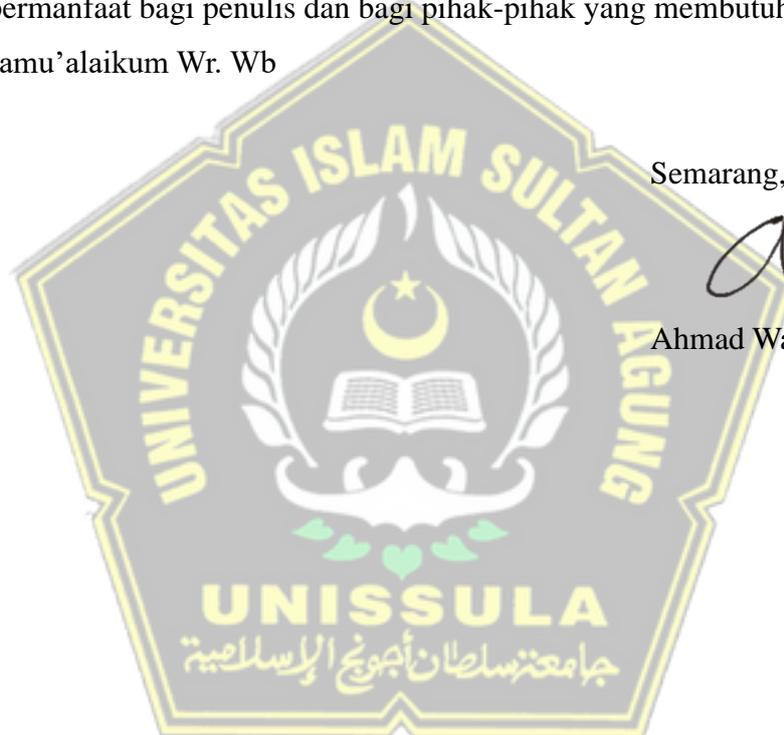
Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis dengan segala kerendahan hati meminta maaf. Segala kritik dan saran sangat penulis harapkan guna perbaikan penelitian. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Mei 2025



Ahmad Wahib Luthfi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.2 Penelitian Terdahulu .....	12
2.3 Kerangka Penelitian .....	14
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	17
3.2 Populasi dan Sampel .....	17
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	18
3.4 Definisi Operasional dan Indikator Variabel .....	18
3.5 Pengukuran Variabel .....	20
3.6 Teknik Analisis Data .....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	26
4.2 Uji Deskripsi Variabel .....	27

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	33
<b>BAB V SIMPULAN .....</b>	<b>43</b>
5.1 Simpulan .....	43
5.2 Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>29</b>



## DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Rincian Dana Desa untuk Kecamatan Se-Jepara tahun 2024 .....	1
2.1 Review Penelitian Terdahulu .....	12
3.1 Unit Analisis .....	18
3.2 Rangkuman Definisi Operasional dan Indikator Variabel .....	19
3.3 Skor Jawaban Responden .....	21
4.1 Penyebaran Kuisisioner .....	26
4.2 Karakteristik Responden .....	26
4.3 Deskripsi Variabel Akuntabilitas .....	28
4.4 Deskripsi Variabel Transparansi .....	29
4.5 Deskripsi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan .....	30
4.6 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat .....	31
4.7 Deskripsi Variabel Pengelolaan Dana Desa .....	32
4.8 Hasil Uji Validitas .....	33
4.9 Hasil Uji reliabilitas .....	35
4.10 Hasil Uji normalitas .....	36
4.11 Hasil Uji Multikolineritas .....	37
4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	38
4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	38
4.14 Tabel Hasil Uji t .....	40
4.15 Hasil Uji F .....	41
4.16 Hasil Koefisien Determinasi .....	42

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran ..... 14



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa perlu mengelola dana desa berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pemanfaatannya berjalan optimal dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Dana desa digunakan untuk membangun wilayah, memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan menanggulangi kemiskinan (Liani & Takari, 2024). Pemerintah pusat menyediakan anggaran dana desa yang besar sebagai bagian dari kebijakan terbaru. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola dana tersebut secara optimal demi mencapai target program dana desa. Berikut adalah penyajian rincian dana desa tahun 2024 untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara:

Tabel 1.1 Daftar Rincian Dana Desa untuk Kecamatan se Jepara Tahun 2024.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Dana Desa
1.	KEDUNG	18	Rp 17.666.075.000
2.	PECANGAAN	12	Rp 13.737.741.000
3.	WELAHAN	15	Rp 15.933.271.000
4.	MAYONG	18	Rp 18.183.515.000
5.	BATEALIT	11	Rp 13.465.762.000
6.	JEPARA	5	Rp 5.078.088.000
7.	MLONGGO	8	Rp 11.529.099.000
8.	BANGSRI	12	Rp 15.998.472.000
9.	KELING	12	Rp 13.562.937.000
10.	KARIMUNJAWA	4	Rp 3.596.993.000
11.	TAHUNAN	15	Rp 19.049.665.000
12.	NALUMSARI	15	Rp 15.484.385.000
13.	KALINYAMATAN	12	Rp 12.055.292.000
14.	KEMBANG	11	Rp 12.414.093.000
15.	PAKIS AJI	8	Rp 11.011.557.000
16.	DONOROJO	8	Rp 10.533.250.000
<b>Total</b>		<b>184</b>	<b>Rp 209.300.195.000,00</b>

*Sumber : sid.kemendesa.go.id*

Berdasarkan data pada tabel, Kecamatan Tahunan menempati posisi teratas, disusul oleh Mayong di posisi kedua, dan Kedung di posisi ketiga. Hal ini Kecamatan Kedung pada tahun 2024 mendapatkan dan

desa di peringkat ketiga dari 16 Kecamatan Se-Kabupaten Jepara sehingga berpeluang mewujudkan desa dan masyarakat yang makmur. Meskipun dana desa yang diterima tergolong besar, pemerintah desa harus tetap mengelola keuangan dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memastikan akuntabilitas melalui transparansi informasi

Desa adalah komunitas hukum yang memiliki wilayah tertentu dan berwenang mengelola kepentingan warga berdasarkan tradisi dan nilai-nilai leluhur. Alfiani dan Estiningrum (2021), desa merupakan bagian dari masyarakat yang menetap dan mengelola pemerintahan secara mandiri di bawah pengawasan seorang kepala desa atau lurah. Desa juga menjadi unit pemerintahan paling kecil dalam lingkup kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebagai institusi pemerintahan di tingkat bawah, desa menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengelolaan APBDes secara maksimal. Untuk itu, pembangunan di tingkat desa menjadi hal yang sangat penting (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Konsep *Good Governance* sendiri bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan *Good Governance*, terutama untuk memastikan efektivitas pelaksanaan otonomi desa. Selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan elemen kunci yang sangat diperlukan agar tata kelola pemerintahan berkualitas dapat terwujud. Kedua aspek ini, transparansi dan akuntabilitas, menjadi fondasi penting dalam praktik pemerintahan maupun pengelolaan perusahaan yang mengikuti prinsip *Good Governance*. Transparansi dapat diukur dari seberapa jauh masyarakat bisa mengakses informasi mengenai kebijakan, aturan, program, alokasi dana, dan kegiatan pemerintahan secara terbuka dan jelas (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di desa

Pemerintah melalui penyaluran dana desa berpotensi meningkatkan pendapatan desa, namun hal ini juga dapat menimbulkan tantangan berupa kemungkinan penyalahgunaan dana pada aparat desa. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengelola dana desa wajib mengatur dan memantau penggunaan dana dengan efisien dan sesuai tujuan, serta menerapkan prinsip *Good Governance* guna mencegah penyimpangan, penyalahgunaan, maupun korupsi. *Good Governance* didasarkan pada tiga aspek penting: keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab (*akuntabilitas*), keterbukaan informasi (*transparansi*), sistem pengelolaan keuangan yang terorganisir, dan keterlibatan aktif masyarakat. Konsep akuntabilitas menjadi hal yang krusial dalam memenuhi persyaratan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Tingkat akuntabilitas menunjukkan sejauh mana pembangunan desa berhasil, sekaligus menjadi landasan dalam menetapkan tujuan dan prioritas penggunaan anggaran desa.. Pengelola dana desa memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan dana kepada para pemangku kepentingan terkait.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan tahap perencanaan dan pertanggungjawaban. Sistem keuangan terdiri dari rangkaian prosedur, mekanisme, perangkat, dan dokumen yang digunakan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan rapi, akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan hukum. Keterbukaan dalam praktik pemerintahan desa mampu membangun dan memupuk kepercayaan warga terhadap segala kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk memantau kinerja pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan ikut serta, masyarakat dapat membantu memastikan anggaran desa digunakan secara efektif melalui kontribusi dalam perencanaan arah kebijakan anggaran (Utami & Sofyan, 2013). Penelitian oleh Firdaus, Suharnio, & Sunarti (2019), Nuzulia (2023), serta Darma Putra & Rasmini (2019) menegaskan bahwa kurangnya pengawasan dari

masyarakat dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan dana. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memahami proses penganggaran desa sangat penting.

Bagi seluruh lapisan pemerintahan desa, khususnya aparat desa, pemahaman tentang administrasi dana desa sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Mispa et al., 2024). Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019:48), pengelolaan dana desa mencakup tahapan-tahapan kunci: perencanaan awal, pelaksanaan berikutnya, pencatatan administrasi, dan akhirnya, pelaporan serta pertanggungjawaban. Selama tahun anggaran (1 Januari hingga 31 Desember), dana ini harus dikelola sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Setiap tahapan pengelolaan wajib mematuhi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan disiplin anggaran yang ketat (Suwarno, 2019)

Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan. Semua desa mendapatkan dana desa, tetapi ada kasus korupsi yang tercatat, seperti pada 12 Oktober 2018, ketika Petinggi Desa Menganti ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2014-2015 (Kejaksaan Negeri Jepara). Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg disebutkan bahwa Aklani bin Bakrudin, Kepala Desa Lontar periode 2015-2021, melakukan penyalahgunaan APBDesa untuk kepentingan pribadi dan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa.

Studi Putra & Rasmini (2019) dengan variabel yang sama, tetapi menambahkan variabel sistem akuntansi keuangan desa. Sistem ini dipilih karena dapat membantu pemerintah desa menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga mengurangi risiko penyimpangan. Pengelolaan sistem keuangan desa yang efektif membantu mempercepat proses penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga dapat selesai sesuai jadwal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Julianto & Dewi (2019) menyatakan bahwa sistem ini menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan dari awal perencanaan

sampai evaluasi. Penggunaan Siskeudes juga memegang peranan krusial dalam kesuksesan pengelolaan dana desa

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melaksanakan studi dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa Se-Kecamatan Kedung". Riset ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik, serta berkontribusi dalam memajukan kualitas pengelolaan dana desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan fokus penelitian sebagai berikut: Bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan, dan Partisipasi Masyarakat memengaruhi Pengelolaan Dana Desa di seluruh Desa Se-Kecamatan Kedung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dampak akuntabilitas pada manajemen dana desa.
2. Mengkaji peran transparansi dalam tata kelola dana desa.
3. Menganalisis hubungan antara sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan dana desa.
4. Menentukan dampak partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat menyumbang secara signifikan pada bidang administrasi publik, khususnya menjadi dasar bagi penelitian mendatang yang mengkaji dampak akuntabilitas, transparansi informasi, sistem pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap tata kelola dana desa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan riset ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas, keterbukaan, dan sistem pencatatan keuangan yang tertib. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif warga desa dalam mengawasi dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan dana desa



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **5.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori *Good Governance***

Muncul paradigma melekat pada konsep *governance* itu sendiri. Secara sejarah, *governance* mulai digunakan oleh para praktisi lembaga pembangunan internasional dan terkait dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas manajemen publik serta pencegahan korupsi. *Governance* biasanya diartikan sebagai cara-cara dalam menjalankan kekuasaan, pengawasan, pemerintahan, dan pengaturan. Terdapat dua pengertian lain tentang *governance*, yakni sebagai proses atau tindakan pemerintahan dan sebagai entitas negara yang diperintah. Selain itu, *governance* juga diartikan sebagai institusi yang membentuk sistem pemerintahan dan melakukan pengelolaan kewenangan. Henk Addink menjelaskan bahwa *governance* memiliki tiga unsur utama, yaitu pemerintah yang berperan sebagai otoritas (*state of being governing*), masyarakat, dan sektor swasta yang mewakili pihak yang diperintah (*state of being governed*). Ketiga unsur ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan suatu negara, sebab sebuah negara harus memenuhi syarat memiliki rakyat, pemerintahan, wilayah, dan kedaulatan; jika salah satunya hilang, maka tidak dapat dikatakan sebagai negara (Ryan Bakry, 2010).

##### **2.1.2 Akuntabilitas**

Prinsip *Good Governance* ini merujuk pada tanggung jawab atas hasil yang dicapai dalam menjalankan fungsi organisasi, baik yang berhasil maupun yang tidak, dan kewajiban untuk melaporkannya secara terbuka. Akuntabilitas menuntut agar setiap proses anggaran, dari perumusan hingga implementasi, dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada publik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara esensial, akuntabilitas menunjukkan peran seorang pemimpin yang diberi otoritas untuk mengelola aset publik dengan penuh tanggung jawab.

Fokus utama dari akuntabilitas adalah memastikan bahwa pengelolaan ADD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, di mana kepala desa berperan sebagai penanggung jawab utama (Dewi, 2020). Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab pihak yang diberi mandat (agen) untuk menyajikan laporan dan memberikan penjelasan atas segala aktivitas yang telah dijalankan kepada pihak yang mendelegasikan wewenang (prinsipal). Kemudian, pihak prinsipal berwenang untuk menilai serta meminta pertanggungjawaban terkait kewajiban yang telah diserahkan.

Akuntabilitas merupakan proses tanggung jawab rutin terhadap penggunaan sumber daya dan implementasi kebijakan oleh pihak pelapor guna mencapai tujuan organisasi (Syahriyatul, 2017). Dalam hal ini, komitmen dari pemimpin dan seluruh aparatur di instansi pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas secara nyata (Rakhmat, 2017).

### **2.1.3 Transparansi**

Keterbukaan merujuk pada situasi di mana data dan informasi mengenai kegiatan ekonomi dan program pemerintah yang didanai publik tersedia serta dapat diakses oleh masyarakat. Dwiyanto (2006) menjelaskan bahwa transparansi melibatkan penyediaan informasi tentang operasional pemerintah, serta memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut dengan mudah dalam bentuk yang memadai. Pengelolaan keuangan daerah berarti adanya keterbukaan penuh yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan pemerintah daerah. Prinsip ini krusial untuk membangun relasi saling percaya dan menguntungkan antara pemerintah dan warga, sebab menyediakan data yang relevan dan mudah diakses.

Dalam konteks akuntansi, transparansi mencerminkan penyampaian laporan keuangan secara terbuka dan jujur kepada publik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola, mempertanggungjawabkan sumber daya, dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. (Mardiasmo, 2018). Secara keseluruhan, transparansi membantu meminimalkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan pengelolaan

anggaran desa dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam musyawarah dan pengambilan keputusan yang sebelumnya dikuasai pemerintah saja.

#### **2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan**

Sistem Akuntansi Keuangan adalah serangkaian prosedur dan metode, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Informasi ini krusial bagi berbagai pihak, baik internal (manajemen) maupun eksternal (investor, kreditor, pemerintah), dalam pengambilan keputusan ekonomi dan penilaian kinerja keuangan.

Sistem ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat secara sistematis, mulai dari input data hingga penyusunan laporan akhir. Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas informasi keuangan. Penerapan sistem yang baik akan membantu entitas dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi operasional, sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan kepada pihak-pihak berkepentingan

#### **2.1.5 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini bukan sekadar hadir dalam pertemuan, tetapi juga mencakup kontribusi ide, tenaga, sumber daya, hingga pengawasan terhadap jalannya kegiatan. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan arah dan bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Melalui partisipasi, masyarakat dapat memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi mereka. Hal ini juga akan meningkatkan rasa memiliki (*ownership*) terhadap hasil pembangunan, mendorong akuntabilitas dari pihak penyelenggara program, serta memperkuat kohesi sosial dalam komunitas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan

#### **2.1.6 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa adalah serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana untuk mengelola keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses ini mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran dana, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pentingnya pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya terletak pada pemenuhan aspek legalitas, tetapi juga pada dampaknya terhadap pembangunan desa. Dengan pengelolaan yang transparan dan partisipatif, masyarakat dapat ikut serta mengawasi penggunaan dana, sehingga meminimalisir potensi penyelewengan dan meningkatkan kepercayaan publik. Proses ini juga menjadi kunci dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal.

## 5.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Review Penelitian Terdahulu**

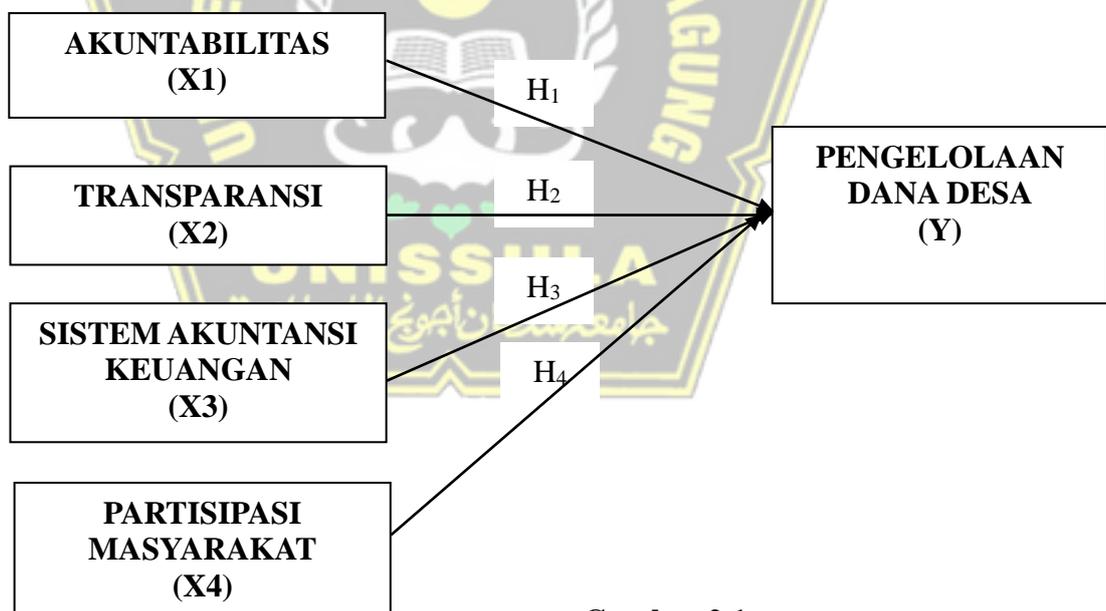
No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Independen	Hasil
1.	Risya Umami & Idang Nurodin (2017)	Akuntabilitas	Kualitas manajemen keuangan desa bisa ditingkatkan secara signifikan melalui konsistensi dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban
		Transparansi	
		Partisipasi Masyarakat	
		Pengelolaan Dana Desa	
2.	Fitri Sukmawati & Alfi Nurfitriani (2019)	Akuntabilitas	Efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban
		Transparansi	
		Akuntabilitas	
		Partisipasi Masyarakat	
3.	Anita Firdaus, Suharnio, dan Sunarti (2019)	Transparansi	Tingkat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi warga dalam proses pemerintahan desa berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa.
		Akuntabilitas	
		Partisipasi Masyarakat	
		Pengelolaan Alokasi Dana Desa	
4.	Ediska Harosa Putri, Witra Maison, dan Rita Dwi Putri (2023)	Transparansi	Pengelolaan keuangan menjadi lebih optimal ketika dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar utama pelaksanaannya
		Akuntabilitas	
		Pengelolaan keuangan desa	
5.	Anggi Alfiani dan Sri Dwi Estiningrum (2021)	Akuntabilitas	Penerapan akuntabilitas, transparansi, serta sistem akuntansi
		Transparansi	
		Sistem Akuntansi	

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Independen	Hasil
		Keuangan Desa	keuangan desa yang memadai dapat mendorong pengelolaan dana desa menjadi lebih baik dan terarah
		Pengelolaan Dana Desa	
6.	Nuzulia Rizqiana (2023)	Akuntabilitas	Pengelolaan dana desa telah terbukti dipengaruhi secara positif oleh diterapkannya sistem pencatatan keuangan desa yang baik dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, proses tersebut tidak secara signifikan dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi
		Transparansi	
		Sistem Akuntansi Keuangan	
		Partisipasi Masyarakat	
		Pengelolaan Keuangan Desa	
7.	Putra Adi Kurniawan (2019)	Transparansi	Meskipun keterbukaan dan pertanggungjawaban terbukti memberikan efek positif pada pengelolaan keuangan desa, kontribusi perangkat desa terhadap manajemen tersebut tidak menunjukkan dampak yang sama
		Akuntabilitas	
		Peran Perangkat desa	
		Pengelolaan Keuangan Desa	
8.	I Made Yoga Darma Putra dan Ini Ketut Rasmini (2019)	Transparansi	Keberhasilan manajemen dana desa sangat dipengaruhi secara positif oleh adanya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat
		Akuntabilitas	
		Partisipasi Masyarakat	
		Evektivitas Pengelolaan Dana Desa	
9.	Muhammad Rifqi (2023)	Transparansi	Dipengaruhi positif oleh transparansi dan kemampuan aparat
		Akuntabilitas	
		Partisipasi Masyarakat	

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Independen	Hasil
		Kompetensi Aparat Desa	desa, sementara akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat justru memberikan pengaruh negatif
10	Umami dan Nurodin (2017).	Transparansi	Dipengaruhi secara positif oleh adanya transparansi dan akuntabilitas.
		Akuntabilitas	
		Pengelolaan Keuangan Desa	

### 5.3 Kerangka Penelitian

Dalam riset ini, digunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Peneliti menetapkan kriteria spesifik untuk memilih anggota populasi yang akan dijadikan sampel.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **5.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Dalam konteks dana desa, akuntabilitas mengacu pada kewajiban aparat desa untuk menyajikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka dan autentik. Hal ini bertujuan agar dana yang dikelola benar-benar dialokasikan untuk memenuhi keperluan warga dan mendorong pemberdayaan demi tercapainya kemakmuran kolektif.

Dampak signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa telah ditunjukkan oleh berbagai riset terdahulu, seperti yang telah dilakukan oleh (Sumiati Rahmawati & Andri Indrawan, 2024), (Harbama, 2023)

H<sub>1</sub> : Akuntabilitas Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

### **2.4.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Tak bisa dimungkiri bahwa keterbukaan sangat vital dalam pengelolaan dana desa. Teori agensi menjelaskan fenomena asimetri informasi, di mana masyarakat sebagai pemberi mandat (prinsipal) cenderung memiliki akses informasi yang lebih terbatas ketimbang pemerintah desa selaku pelaksana (agen). Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi diharapkan dapat menyediakan akses informasi yang komprehensif bagi masyarakat, guna meminimalkan ketidakseimbangan tersebut.

Dampak yang menguntungkan pada efektivitas manajemen dana desa telah disimpulkan sebagai hasil dari transparansi oleh berbagai studi, seperti yang dilakukan oleh (Usman; et al., 2022), (Alfajar & Fitriano, 2025)

H<sub>2</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

### **2.4.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Pentingnya sistem akuntansi keuangan desa dalam mendokumentasikan setiap transaksi finansial terkait pemanfaatan dana desa ditekankan oleh Sujarweni (2014). Senada dengan itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 merinci bahwa sistem akuntansi sektor publik mencakup tahapan dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan mengenai posisi dan aktivitas keuangan pemerintah. Ismail dan rekan-rekannya (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa seluruh proses ini dapat dijalankan secara tradisional atau dengan bantuan teknologi komputasi.

Penelitian dari Sri Dwi Estiningrum (2021) dan Arfiansyah (2020) memperkuat argumen bahwa sistem akuntansi keuangan memiliki dampak positif pada pengelolaan dana desa yang efektif. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H<sub>3</sub> : Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

#### **2.4.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Peran proaktif warga dalam pengembangan sumber daya manusia di tingkat desa tercermin melalui keterlibatan mereka dalam manajemen dana desa. Partisipasi ini dipandang sebagai aspek yang vital karena mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pemberian masukan kepada pemerintah desa. Kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan dana desa telah ditegaskan melalui berbagai penelitian, termasuk yang dilakukan oleh (Usman; et al., 2022), (Mentari Tumbel, 2017), (Watu et al., 2023)

H<sub>4</sub> : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Pendekatan kuantitatif diadopsi dalam studi ini untuk memungkinkan analisis data statistik secara tepat dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Data primer dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui kuesioner, observasi, dan pengujian. Instrumen penelitian diisi oleh responden yang merepresentasikan populasi, kemudian data yang diperoleh dikonversi menjadi data kuantitatif dengan pemberian skor pada setiap item kuesioner.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Studi ini menargetkan populasi yang terdiri dari masyarakat aktif di desa-desa Kecamatan Kedung. Yang dimaksud dengan masyarakat aktif adalah individu yang peduli, terlibat, dan berkontribusi untuk kemajuan. Populasi penelitian ini secara khusus berada di desa-desa di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan purposive sampling, memilih subjek berdasarkan ciri khas tertentu. Sampel yang terpilih mencakup perangkat desa yang berperan dalam mengelola dana desa, seperti kepala desa, kaur, dan kasi, dengan pengalaman kerja minimal satu tahun

**Tabel 3.1. Unit Analisis**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Perangkat Desa	7 Orang
3.	Perwakilan Masyarakat	5 Orang

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Instrumen utama berupa kuesioner yang terdiri dari bagian data pribadi responden yang akan dirahasiakan serta sejumlah pertanyaan indikator untuk mengukur variabel yang diteliti. Seluruh kuesioner diserahkan secara langsung kepada para responden.

### 3.4 Definisi Operasional dan Indikator Variabel

**Tabel 3.2 Rangkuman Definisi Operasional dan Indikator Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Manajemen dana desa meliputi berbagai aktivitas pemerintah desa, dimulai dari mengumpulkan informasi, merencanakan, mengorganisasi, hingga mengimplementasikan anggaran. Selanjutnya, proses ini dilengkapi dengan pengendalian, penilaian capaian, serta pembuatan laporan akuntabilitas, semuanya untuk memastikan tujuan bersama yang ditetapkan dapat terpenuhi secara maksimal	Menggunakan instrumen (Streets, 1985) yang terdiri dari 7 pernyataan yaitu sebagai berikut : a. Pencapaian tujuan b. Integritas c. Adaptasi	Skala <i>Likert</i>
Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban agen yang memegang kepercayaan untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan menginformasikan seluruh aktivitas yang menjadi tugasnya kepada prinsipal, pihak yang berwenang dan berhak meminta pertanggungjawaban itu (Mardiasmo, 2018)	Menggunakan instrumen dari Mada (2017) yang terdiri atas 8 pernyataan, a. Menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan. b. Melaporkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan c. Keselarasan dengan prosedur yang ditetapkan d. Kelengkapan data yang disampaikan e. dan ketepatan waktu pelaporan	Skala <i>Likert</i>
Transparansi (X2)	Menurut Mardiasmo (2018), transparansi adalah memberikan peluang bagi setiap individu yang membutuhkan untuk mengakses informasi publik secara terbuka dan tanpa hambatan	Dalam penelitian ini dipakai instrumen berdasarkan Kristianten (2006) yang mencakup enam poin pernyataan, yaitu: a. Ketersediaan dan kemudahan akses dokumen b. Informasi yang	Skala <i>Likert</i>

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		<p>transparan dan menyeluruh</p> <p>c. Proses pelaksanaan yang terbuka</p> <p>d. Regulasi yang mendukung penerapan transparansi</p>	
Sistem Akuntansi Keuangan (X3)	Menurut Kusumadewi (2020), Sistem Akuntansi Keuangan Desa merupakan suatu praktik yang melibatkan komponen-komponen terintegrasi dengan memanfaatkan informasi kuantitatif untuk pengelolaan dana, yang memengaruhi warga di daerah yang memiliki kewenangan mengelola urusan pemerintahan terkecil di bawah camat	<p>Peneliti telah menyusun dan mengadaptasi lima indikator pertanyaan yang diambil dari hasil penelitian sebelumnya (Alfiani dan Estiningrum, 2021) sebagai berikut:</p> <p>a. Pengertian mengenai akuntansi</p> <p>b. Yang di akuntasikan</p> <p>c. Standar akuntansi</p> <p>d. Ketepatan waktu dalam pencatatan transaksi</p> <p>e. Penerapan sistem akuntansi keuangan desa</p>	Skala Likert
Partisipasi Masyarakat (X4)	Keterlibatan warga dalam proses pemerintahan yang berperan dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintah serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Agar anggaran dapat digunakan secara efektif (Utami & Syofyan, 2013).	<p>Instrumen yang digunakan mengacu pada Mada (2017) dengan enam item pernyataan, yaitu:</p> <p>a. Penyusunan dan pengajuan rencana anggaran</p> <p>b. Partisipasi aktif dalam rapat paripurna</p> <p>c. Terlibat dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan</p> <p>d. Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran</p> <p>e. Pemberian apresiasi atau penghargaan</p>	Skala Likert

### 3.5 Pengukuran Variabel

Setiap variabel yang akan dinilai melalui skala Likert diuraikan terlebih dahulu ke dalam sejumlah indikator, yang kemudian dijadikan acuan dalam menyusun butir-butir pertanyaan atau pernyataan. (Sugiyono, 2018).

**Tabel 3.3 Skor Jawaban Responden**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Sangat Setuju (S)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 4.2.1 Uji Kualitas Data

##### 1. Uji Validitas

Menurut Sekaran (2008:248), validitas mengacu pada keakuratan suatu instrumen, metode, atau prosedur dalam mengukur konsep yang dituju. Uji validitas bertujuan memastikan setiap elemen dalam alat penelitian memenuhi kriteria kelayakan dan keabsahan. Prosesnya melibatkan perbandingan koefisien korelasi r hitung dengan nilai r tabel, yang ditentukan berdasarkan derajat kebebasan ( $df=n-2$ ).

##### 2. Uji Reliabilitas

Menunjukkan tingkat ketepatan pengukuran yang tidak mengandung kesalahan atau bias. Karena itu, pengukuran harus konsisten baik secara waktu maupun antar item dalam instrumen. Menurut Ghozali (2005), Untuk dikatakan reliabel, sebuah konstruk harus memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Apabila nilainya di bawah ambang batas tersebut, maka konstruk itu dianggap tidak andal.

### **3. Uji Asumsi Klasik**

#### **A. Uji Normalitas**

Penerapan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), sebuah metode statistik non-parametrik, digunakan dalam penelitian ini. Merujuk pada Ghozali (2005), residual data diklasifikasikan normal apabila nilai signifikansinya melampaui 0,05, sedangkan nilai di bawah ambang batas itu menunjukkan data tidak normal.

#### **B. Uji Multikolinieritas**

Sebagaimana diungkapkan oleh Nugroho (2005:58), uji multikolinieritas merupakan teknik untuk mendeteksi kemiripan antar variabel independen dalam model. Tujuannya adalah untuk mencegah kekeliruan dalam menilai dampak individual variabel bebas terhadap variabel terikat. Suatu model dianggap bebas multikolinieritas jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) maksimal 10, dan nilai toleransi minimal 0,1. Ghozali (2006) merinci bahwa VIF dihitung sebagai 1 dibagi nilai toleransi, yang berarti VIF 10 akan menghasilkan nilai toleransi 0,1.

#### **C. Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi yang baik dicirikan oleh variasi residual yang seragam selama masa observasi, yang berarti tidak ada heteroskedastisitas. Keberadaan heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan memeriksa pola pada scatter plot atau melalui uji White. Pada uji White, kuadrat residual menjadi variabel dependen, sementara variabel-variabel independennya adalah variabel asli, kuadratnya, dan hasil perkalian antar setiap pasangan variabel bebas. Setelah itu, regresi dilakukan pada kuadrat residual menggunakan variabel-variabel tersebut.

### **4. Uji Regresi Linier Berganda**

Menurut Ghozali (2006), regresi berfungsi untuk mengukur dampak per unit perubahan pada variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Selain itu, regresi juga menganalisis bagaimana beberapa variabel independen secara bersamaan memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, kami menggunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$PDD = \alpha + \beta_1 AK_1 + \beta_2 TP_2 + \beta_3 SAK_3 + \beta_4 PM_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Pengelolaan Dana Desa
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien regresi
AK1	= Akuntabilitas
TP2	= Transparansi
SAK3	= Sistem Akuntansi Keuangan
PM4	= Partisipasi Masyarakat
e	= Standar Error

## 5. Uji *Good of Timing*

### A. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh bersama variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan uji F. Apabila nilai Fhitung melebihi Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen.

### B. Uji Koefisien Determinasi

Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai R2 rendah, ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen masih terbatas. Sebaliknya, jika nilai R2 mendekati 1, hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen memberikan informasi yang sangat komprehensif dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen

Adjusted R2 (Radj2) dipakai untuk mengatasi keterbatasan R2. Sebagai koefisien determinasi yang telah disesuaikan, nilainya dapat berubah meningkat atau menurun seiring penambahan variabel ke dalam model regresi.

## 6. Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk menilai besarnya pengaruh individual dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan uji t. Rumusan hipotesis statistik yang digunakan dalam pengujian ini dirumuskan sebagai berikut.:

### a. Menentukan Hipotesis Statistik:

- i.  $H_0$  : Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa koefisien  $\beta_1$  sama dengan 0, yang mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh parsial yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- ii.  $H_a$  : Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan bahwa koefisien  $\beta_1$  tidak sama dengan 0, yang menandakan bahwa pengaruh parsial yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen terjadi.

### b. Menentukan tingkat signifikan

Analisis ini mengadopsi tingkat signifikansi 5% (0,05), yang memberikan toleransi 5% terhadap potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

### c. Kriteria Pengambilan Keputusan

- 1) Apabila nilai probabilitas dari hasil uji lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga tidak ditemukan pengaruh signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Sebaliknya, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang menunjukkan bahwa pengaruh signifikan secara individual dari variabel bebas terhadap variabel dependen telah ditemukan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Riset ini dilakukan di 18 desa di Kecamatan Kedung. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden. Sebanyak 234 kuesioner yang memenuhi syarat inklusi peneliti berhasil terkumpul. Mengingat setiap desa diwakili oleh lima responden, maka jumlah total responden dari ke-18 desa tersebut adalah 234 orang. Berikut adalah gambaran data kuesioner responden:

**Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	234
2.	Kuesioner yang tidak Kembali	0
3.	Kuesioner yang kembali	234
4.	Kuesioner yang tidak lengkap	0
5.	Kuesioner yang dapat diolah	234
<b>Respon Rate = <math>234/234 \times 100\%</math></b>		<b>100%</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Sebanyak 234 kuesioner sampel dari Tabel 4.1 telah dikategorikan menurut usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan jabatan responden. Data tersebut kemudian ditabulasi dan ditampilkan dalam format statistik deskriptif berikut:

**Tabel 4.2 Karakteristik Responden**

Karakteristik	Jumlah	Prosentase
<b>Jenis Kelamin :</b>		
Laki-laki	180	76,92%
Perempuan	42	23,08%
<b>Umur :</b>		
≤ 25 Tahun	10	4,27%
26 - 35 Tahun	45	20,94%
36 – 45 Tahun	70	29,91%
46 – 55 Tahun	72	32,91%
≥ 56 Tahun	25	11,97%
<b>Pendidikan Terakhir :</b>		
SMP	19	8,12%
SMA/SMK/MA	148	63,25%
DIPLOMA	7	2,99%

Karakteristik	Jumlah	Prosentase
S1	47	20,09%
S2	1	5,56%
<b>Agama:</b>		
Islam	222	100%
Kristen	0	0%
Budha	0	0%

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Penelitian ini mencakup 234 partisipan dari 18 desa di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, yang semuanya diseleksi berdasarkan kriteria penelitian yang ditetapkan. Profil responden meliputi informasi mengenai jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan terakhir, agama, dan posisi mereka. Dari segi jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki dengan 180 orang (76,92%), sementara perempuan berjumlah 54 orang (23,08%).

Mengenai tingkat pendidikan terakhir, sebanyak 19 responden (8,12%) berlatar belakang SMP, 148 orang (63,25%) lulusan SMA/SMK, 7 orang (2,99%) berijazah Diploma, 47 orang (20,09%) bergelar Sarjana (S1), dan 13 orang (5,56%) bergelar Magister (S2).

Untuk agama, seluruh responden (100%) adalah pemeluk agama Islam, tanpa adanya responden beragama Kristen atau Buddha (0%). Dalam hal jabatan, 144 responden (62%) mengisi posisi kepala desa, sekretaris, bendahara, kepala seksi, dan kepala urusan, sementara 90 responden (38%) lainnya menjabat sebagai Kepala Seksi Program

#### 4.2 Uji Statistik Deskriptif Variabel

Instrumen ini dirancang untuk mengukur tingkat persetujuan seseorang terhadap pernyataan yang berkaitan dengan sikap, kepercayaan, atau persepsi mengenai isu-isu sosial. Mengacu pada Sugiyono (2018), Skala yang digunakan memiliki lima tingkat jawaban, di mana responden diminta memilih satu opsi yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Setiap pilihan jawaban memiliki nilai yang merepresentasikan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan tersebut.

#### 4.2.1 Deskripsi Variabel Akuntabilitas

Akuntabilitas diukur menggunakan delapan pernyataan. Tanggapan dari responden serta analisis berdasarkan indeks skor untuk variabel akuntabilitas:

**Tabel 4.3**  
**Deskripsi Variabel Akuntabilitas**

Kuisoner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)	
X1.1	1	0%	0	0%	2	1%	124	53%	107	46%
X1.2	0	0%	0	0%	2	1%	131	56%	97	41%
X1.3	1	0%	1	0%	1	0%	134	57%	97	41%
X1.4	0	0%	0	0%	3	1%	128	55%	103	44%
X1.5	1	0%	0	0%	2	1%	126	54%	105	45%
X1.6	0	0%	0	0%	9	4%	137	59%	88	38%
X1.7	0	0%	3	1%	4	2%	145	62%	78	33%
X1.8	11	5%	3	1%	8	3%	110	47%	98	42%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Mengacu pada Tabel 4.3, yang berisi pernyataan-pernyataan variabel akuntabilitas, data menunjukkan bahwa 53% responden menyetujui pernyataan pertama tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan secara jujur dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pernyataan kedua, yakni bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, disetujui oleh 56% responden. Untuk pernyataan ketiga, yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban disusun menggunakan prosedur akuntansi yang baik, sebanyak 57% responden menyatakan setuju.

Pernyataan keempat mengenai penyampaian informasi oleh pemerintah desa terkait pencapaian program dana desa mendapat persetujuan dari 55% responden. Sementara itu, pernyataan kelima bahwa laporan pertanggungjawaban disusun dengan informasi yang akurat dan dapat dipercaya disetujui oleh 54% responden. Sebanyak 59% responden setuju dengan pernyataan keenam, yang menyatakan bahwa pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Pada pernyataan ketujuh, sebanyak 62% responden setuju bahwa pengelolaan dana desa wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang di tingkat pemerintah pusat atau daerah. Adapun pernyataan kedelapan, yang menegaskan perlunya pelaporan dan

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat, memperoleh persetujuan dari 47% responden.

#### 4.2.2 Deskripsi Variabel Transparansi

Variabel transparansi diukur menggunakan enam pernyataan. Rekapitulasi tanggapan responden dan analisis indeks skor untuk variabel transparansi ditampilkan.

**Tabel 4.4**  
**Deskripsi Variabel Transparansi**

Kuisoner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)	
X2.1	0	0%	0	0%	7	3%	157	67%	70	30%
X2.2	0	0%	4	2%	7	3%	131	56%	92	39%
X2.3	1	2%	4	2%	6	3%	135	58%	88	38%
X2.4	0	0%	0	0%	5	2%	137	59%	92	39%
X2.5	0	0%	0	0%	5	2%	131	56%	97	41%
X2.6	1	0%	0	0%	7	3%	124	53%	102	44%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Merujuk pada Tabel 4.4, (67%) menyatakan setuju bahwa laporan keuangan desa diterbitkan secara berkala. Selain itu, 56% responden menilai pemerintah desa terbuka dalam menyediakan dokumen Akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan dana desa dinilai penting, dengan dukungan terhadap keterlibatan Muspida dalam Musrenbang disampaikan oleh 58% responden guna mendorong transparansi kebijakan keuangan desa. Sebanyak 59% responden berpendapat bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban dan audit, telah dilaksanakan secara terbuka. Selain itu, 56% responden berpendapat bahwa pemerintah desa telah memahami dan menjalankan kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dengan jujur, lengkap, dan transparan. Sementara itu, 53% responden menyatakan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam proses musyawarah dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa.

### 4.2.3 Deskripsi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan

Diukur menggunakan lima pernyataan. Ringkasan tanggapan responden dan analisis indeks skor untuk variabel ini:

**Tabel 4.5**  
**Deskripsi Variabel Sistem Akuntansi Keuangan**

Kuisoner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)	
X3.1	0	0%	2	1%	10	4%	170	73%	52	22%
X3.2	0	0%	1	0%	9	4%	152	65%	72	31%
X3.3	1	0%	0	0%	5	2%	154	66%	74	32%
X3.4	0	0%	0	0%	6	3%	139	59%	89	38%
X3.5	0	0%	0	0%	5	2%	153	65%	76	32%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Mengacu pada Tabel 4.5 (73%) berpendapat bahwa akuntansi merupakan serangkaian tahapan untuk mengenali, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi suatu organisasi guna mendukung pengambilan keputusan. Ditambah lagi, 65% responden sependapat bahwa salah satu jenis transaksi yang termasuk dalam sistem APBDes dan 66% responden mengindikasikan bahwa standar akuntansi yang digunakan adalah standar resmi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan desa.

Selain itu, sebanyak 59% responden mengungkapkan persetujuannya bahwa pencatatan transaksi dilakukan secara tepat waktu dan efisien. Sebanyak 65% responden berpendapat bahwa sistem akuntansi keuangan desa mempermudah pencatatan seluruh transaksi

### 4.2.4 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat

Dinilai melalui enam butir pernyataan. Ringkasan tanggapan responden beserta analisis indeks skornya untuk variabel tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.6**  
**Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat**

Kuisoner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)	
X4.1	0	0%	0	0%	12	5%	127	54%	92	39%
X4.2	2	1%	0	0%	16	7%	108	46%	108	46%
X4.3	0	0%	3	1%	6	3%	108	46%	117	50%
X4.4	0	0%	2	1%	9	4%	133	57%	90	38%
X4.5	0	0%	1	0%	24	10%	102	44%	107	46%
X4.6	3	1%	13	6%	20	9%	110	47%	88	38%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Mengacu pada Tabel 4.6 (54%) sepakat bahwa masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan pemanfaatan dana desa. Untuk pernyataan tentang peran masyarakat dalam mengajukan alternatif rencana anggaran melalui BPD, 46% responden menyatakan "setuju" dan 46% "sangat setuju". Kemudian, setengah dari responden (50%) "sangat setuju" bahwa masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam rapat paripurna untuk pembahasan dan penetapan anggaran desa.

Pada indikator keempat, sebanyak 57% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Sementara itu, untuk pernyataan kelima, sebesar 46% responden sangat mendukung keterlibatan masyarakat dalam memberikan evaluasi atas pelaksanaan anggaran tersebut. Terakhir, 47% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat juga turut berperan dalam memberikan apresiasi.

#### 4.2.5 Deskripsi Variabel Pengelolaan Dana Desa

Variabel pengelolaan dana desa dievaluasi menggunakan tujuh pernyataan. Ringkasan jawaban responden dan analisis indeks skor untuk variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Deskripsi Variabel Pengelolaan Dana Desa**

Kuisoner	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)	

Y1.1	1	0%	0	0%	3	1%	152	65%	97	41%
Y1.2	1	0%	1	0%	4	2%	131	56%	97	41%
Y1.3	1	0%	0	0%	0	0%	128	55%	105	45%
Y1.4	1	0%	0	0%	6	3%	139	59%	88	38%
Y1.5	0	0%	0	0%	3	1%	156	67%	75	32%
Y1.6	0	0%	2	1%	7	3%	125	53%	100	43%
Y1.7	1	0%	0	0%	3	1%	135	58%	95	41%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Mengacu pada Tabel 4.7, sebanyak 65% sepakat bahwa distribusi dan penggunaan dana desa berjalan sesuai rencana yang ditetapkan hingga rampung. Lalu, 56% responden menyatakan persetujuan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk program pembangunan dan pemberdayaan desa. Lebih lanjut, 55% responden "sangat setuju" bahwa pemerintah desa mengikuti prosedur yang berlaku dalam memanfaatkan dana desa.

Lebih lanjut, 59 % responden setuju bahwa alokasi dana desa berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pelatihan dan sosialisasi terkait program dana desa kepada aparat desa dan warga desa mendapat persetujuan tertinggi, yakni 67 % responden menyatakan setuju. Sebanyak 53 % responden menilai pemerintah desa telah membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan penerangan yang memadai, dan 58 % menyetujui bahwa sarana-prasarana yang tersedia mendukung kelancaran pengelolaan dana desa.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Uji Keabsahan Data**

##### **1. Uji Validitas**

Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:57), kualitas suatu instrumen penelitian dinilai melalui dua komponen utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji kualitas data yang dikumpulkan dari instrumen. Pada uji validitas, koefisien korelasi dihitung oleh peneliti. Berdasarkan Ghazali (2016:52), sebuah item dinyatakan valid apabila

nilai r hitung melebihi nilai r tabel. Berikut ini disajikan hasil uji validitas per variabel:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	r tabel	r hitung	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0.138	0.741	Valid
	X1.2	0.138	0.824	Valid
	X1.3	0.138	0.742	Valid
	X1.4	0.138	0.760	Valid
	X1.5	0.138	0.729	Valid
	X1.6	0.138	0.769	Valid
	X1.7	0.138	0.769	Valid
	X1.8	0.138	0.739	Valid
Transparansi	X2.1	0.138	0.138	Valid
	X2.2	0.138	0.138	Valid
	X2.3	0.138	0.220	Valid
	X2.4	0.138	0.192	Valid
	X2.5	0.138	0.225	Valid
	X2.6	0.138	0.260	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan	X3.1	0.138	0.206	Valid
	X3.2	0.138	0.150	Valid
	X3.3	0.138	0.236	Valid
	X3.4	0.138	0.213	Valid
	X3.5	0.138	0.202	Valid
Partisipasi Masyarakat	X4.1	0.138	0.306	Valid
	X4.2	0.138	0.190	Valid
	X4.3	0.138	0.275	Valid
	X4.4	0.138	0.257	Valid
	X4.5	0.138	0.241	Valid
	X4.6	0.138	0.341	Valid
Pengelolaan Dana Desa	Y1	0.138	0.306	Valid
	Y2	0.138	0.234	Valid
	Y3	0.138	0.280	Valid
	Y4	0.138	0.239	Valid
	Y5	0.138	0.340	Valid
	Y6	0.138	0.352	Valid
	Y7	0.138	0.189	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel yang dimaksud, semua item pada variabel independen (akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan, dan partisipasi masyarakat) serta variabel dependen (pengelolaan dana desa) menunjukkan nilai

rhitung yang lebih besar dari  $r_{tabel}$ . Hasil ini mengonfirmasi bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Untuk menilai konsistensi internal instrumen penelitian (misalnya kuesioner) agar menghasilkan data yang stabil saat diterapkan berulang kali pada variabel yang sama, dilakukan pengujian reliabilitas. Stabilitas pengukuran, baik antar-item maupun dari waktu ke waktu, dipastikan melalui uji ini. Metode Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) umumnya digunakan dalam program SPSS. Menurut Ghozali (2005), suatu konstruk atau variabel dianggap reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,60, dan dianggap kurang reliabel jika nilainya di bawah 0,60. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0.779	Reliable
2.	Transparansi	0.800	Reliable
3.	Sistem Akuntansi Keuangan	0.802	Reliable
4.	Partisipasi Masyarakat	0.798	Reliable
5.	Pengelolaan Dana Desa	0.792	Reliable

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9, nilai Cronbach's Alpha untuk semua variabel ditemukan berada di atas 0,60. Dengan demikian, keandalan tinggi dan validitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditegaskan untuk pengumpulan data.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa estimasi parameter dalam model regresi dinyatakan valid dan model tersebut dinyatakan layak digunakan, dilakukan uji asumsi klasik. Asumsi dasar berupa normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dianggap tidak dilanggar oleh model regresi yang berkualitas.

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (non-parametrik) diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Tujuan dari uji ini adalah untuk memverifikasi bahwa residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2021). Model regresi dianggap valid apabila residualnya didistribusikan secara normal atau mendekati normal. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal; sebaliknya, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, residual dinyatakan tidak berdistribusi normal

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test***

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>			
		Unstandardized Residual	
N		234	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.01965411	
Most Extreme Differences	Absolute	.099	
	Positive	.099	
	Negative	-.082	
Test Statistic		.099	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.019 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.015
		Upper Bound	.022
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2025*

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov non-parametrik, distribusi normal ditunjukkan oleh residual model regresi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,19 yang melebihi 0,05 untuk seluruh variabel yang diteliti, yaitu akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi.

## 2. Uji Multikoleniritas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mendeteksi korelasi kuat antar variabel independen dalam analisis regresi. Penting bagi model regresi yang baik untuk tidak memiliki korelasi tinggi antar variabel prediktornya.

Dalam penelitian ini, kami memeriksa multikolinearitas dengan melihat nilai toleransi dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Multikolinearitas dianggap tidak ada jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Multikoleniritas**

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>								
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>(Constant)</i>	1.665	1.116		1.493	.137		
	<i>TOTALX1</i>	-.016	.026	-.042	-.612	.541	.872	1.147
	<i>TOTALX2</i>	.008	.060	.016	.135	.893	.275	3.632
	<i>TOTALX3</i>	-.187	.087	-.282	-2.148	.033	.237	4.224
	<i>TOTALX4</i>	.160	.042	.381	3.823	.000	.412	2.427

*a. Dependent Variable: Abs\_RES*

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Uji multikolinearitas mengindikasikan tidak adanya korelasi signifikan antar variabel bebas. Ini dibuktikan dengan nilai toleransi masing-masing variabel yang di atas 0,10 dan nilai VIF yang di bawah 10.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui adanya ketidakseragaman varians residual pada setiap observasi dalam model regresi, dilakukan uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian

ini, metode Glejser diterapkan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel-variabel independen. Berikut adalah hasil uji yang disajikan.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.665	1.116		1.493	.137
	TOTALX1	-.016	.026	-.042	-.612	.541
	TOTALX2	.008	.060	.016	.135	.893
	TOTALX3	-.187	.087	-.282	-2.148	.033
	TOTALX4	.160	.042	.381	3.823	.000

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Dalam studi ini, metode Glejser diterapkan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, yaitu ketidaksamaan varians residual di antara observasi dalam model regresi. Suatu model regresi dianggap valid jika tidak menunjukkan indikasi heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah transformasi logaritma pada variabel bebas, semua variabel independen terbebas dari heteroskedastisitas, dibuktikan dengan nilai signifikansi yang melebihi 0,05; sebagai contoh, variabel akuntabilitas memiliki nilai sig. sebesar 0,541.

### 4.3.3 Uji Statistik

#### 1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur dampak perubahan satu unit pada variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Metode ini juga menganalisis pengaruh gabungan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan (Ghozali, 2006):

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	4.382	1.696
	TOTALX1	.117	.039
	TOTALX2	.284	.091
	TOTALX3	.518	.132
	TOTALX4	.138	.064

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2025*

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PDD = \alpha + \beta_1 AK_1 + \beta_2 TP_2 + \beta_3 SAK_3 + \beta_4 PM_4 + e$$

$$PDD = 4.382 + 0.117 + 0.284 + 0.518 + 0.138$$

Dari persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menunjukkan bahwa jika semua variabel independen tidak memiliki pengaruh, maka variabel dependen akan berada pada nilai tertentu.
2. Peningkatan akuntabilitas berkorelasi positif dengan pengelolaan dana desa, dengan setiap kenaikan pada akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan dana desa.
3. Setiap peningkatan pada transparansi berpotensi meningkatkan pengelolaan dana desa
4. Sistem akuntansi keuangan desa dengan koefisien 0,518 menunjukkan pengaruh yang signifikan; setiap peningkatan satu unit pada sistem ini akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 51%.
5. Koefisien 0,138 untuk partisipasi masyarakat mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu poin dalam partisipasi akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana desa sebesar 13%

## 2. Uji t

Untuk mengevaluasi dampak masing-masing variabel independent yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2), sistem akuntansi keuangan (X3), dan partisipasi masyarakat (X4) terhadap pengelolaan dana desa (Y), kami melakukan uji t (uji parsial). Nilai thitung untuk keempat variabel ini disajikan lengkap dalam tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	1.665	1.116		1.493	.137
	TOTALX1	-.016	.026	-.042	-.612	.541
	TOTALX2	.008	.060	.016	.135	.893
	TOTALX3	-.187	.087	-.282	-2.148	.033
	TOTALX4	.160	.042	.381	3.823	.000

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Penelitian ini memanfaatkan uji t untuk mengevaluasi besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Hasil pengujian secara rinci disajikan sebagai berikut:

a. Pengujian hipotesis Ha 1

Dengan koefisien beta sebesar 0,16 dan tingkat signifikansi 0,54, pengaruh variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa tidak dianggap signifikan, berbeda dengan ekspektasi awal yang mengharapkan dampak positif. Hal ini disebabkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,54 yang melebihi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak.

b. Pengujian hipotesis Ha 2

Koefisien beta transparansi sebesar 0,08 dengan nilai signifikansi 0,893 menunjukkan bahwa transparansi tidak dianggap berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Karena nilai signifikansi tersebut jauh di atas 0,05, maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak dan hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima.

c. Pengujian hipotesis Ha 3

Pada hipotesis ketiga, koefisien beta sistem akuntansi keuangan desa sebesar 0,187 dengan nilai signifikansi 0,33 menunjukkan bahwa pengaruh signifikan variabel tersebut terhadap pengelolaan dana desa tidak ditemukan. Oleh karena itu, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak.

d. Pengujian hipotesis Ha 4

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa koefisien beta partisipasi masyarakat sebesar 0,160 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa telah

dibuktikan secara tegas. Oleh karena itu, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima dan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak.

### 3. Uji F

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, kami melakukan uji F. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada perbandingan nilai signifikansi dengan ambang batas 5% ( $\alpha=0,05$ ).

Jika nilai signifikansi yang ditemukan di bawah 0,05, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas secara kolektif terhadap variabel terikat adalah signifikan. Namun, jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka pengaruh tersebut dianggap tidak signifikan. Hasil pengujian selengkapnya disajikan sebagai berikut

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1253.939	4	313.485	75.534	.000 <sup>b</sup>
Residual	950.408	229	4.150		
Total	2204.346	233			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara gabungan memengaruhi variabel dependen, dilakukan uji F. Penentuan hasil uji dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi uji dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ). Apabila nilai signifikansi ditemukan di bawah 0,05, maka dianggap bahwa variabel bebas secara bersamaan memberikan dampak signifikan pada variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi berada di atas 0,05, pengaruh tersebut dianggap tidak berarti.

### 4. Uji Koefisien Determinasi

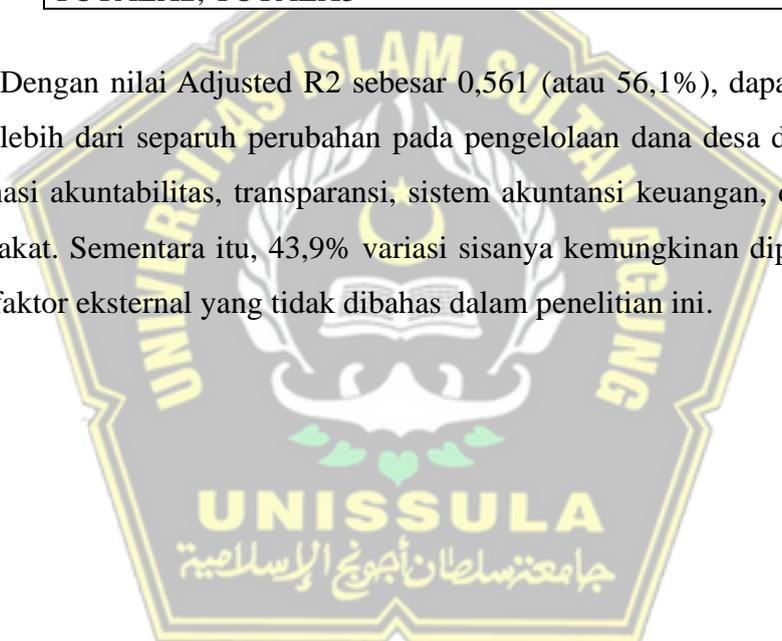
Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai seberapa baik model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Penelitian ini berfokus pada

kontribusi gabungan dari akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap perubahan dalam pengelolaan dana desa. Nilai Adjusted R<sup>2</sup>, yang menunjukkan tingkat pengaruh kolektif variabel independen terhadap variabel dependen, akan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Koefisiensi Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 <sup>a</sup>	.569	.561	2.037
a. Predictors: (Constant), TOTALX4, TOTALX1, TOTALX2, TOTALX3				

Dengan nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,561 (atau 56,1%), dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh perubahan pada pengelolaan dana desa dijelaskan oleh kombinasi akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, 43,9% variasi sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dibahas dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil pengujian menggunakan SPSS sebagai berikut:

1. Meskipun akuntabilitas menunjukkan pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, efeknya tidak signifikan secara statistik. Ini berarti kita menerima hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menolak hipotesis alternatif ( $H_a$ ).
2. Demikian pula, transparansi berkontribusi positif pada pengelolaan dana desa, namun pengaruhnya juga tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak.
3. Hubungan positif antara sistem akuntansi keuangan desa dan pengelolaan dana desa memang ada, tetapi pengaruhnya tidak mencapai ambang batas signifikansi. Oleh karena itu, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak.
4. Sebaliknya, partisipasi masyarakat menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Ini berarti kita menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dan menolak hipotesis nol ( $H_0$ ).
5. Diketahui bahwa pengelolaan dana desa yang efektif memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan dana desa akan mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat, sementara partisipasi masyarakat cenderung menurun jika pengelolaan dana desa kurang optimal.

#### **5.2 Saran**

Sebaiknya dilakukan pembinaan yang lebih baik terkait akuntabilitas, transparansi, system akuntansi keuangan, partisipasi masyarakat terhadap guna masyarakat agar dapat mengetahui tentang pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222.
- Bakry, Ryan Mohammad. 2010. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance. *Diunduh dari : lib.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T %2027944-Implementasi%20hak-HA.pdf*. Diakses pada 28-11-2016, pukul 11.00 WIB
- Dewi, & Sapari. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9 (5), 1-20
- Dewi, Filda Gean Rosiana. 2020. “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan.”
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Firdaus, Anita dan Suharno, Sunarti. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 3 September 2019: 291 – 300*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>.

- Isbandi. 2007. "Interversi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Masyarakat."
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Jakarta Pusat.
- Mada, S. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*.
- Makhmudah, Syahriyatul. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. STIE Widyagama: Lumajang
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 37 Tahun 2007. Tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jakarta. Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Perdana, Khaeril Wahyu. 2014. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Yogyakarta: Progam Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Permendagri No 113. 2014. "Pengelolaan Keuangan Desa."

- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28 (1), 132-158. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p06>
- Putusan PN Serang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG diakses pada tanggal 16 November 2024 jam 14.36 WIB <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee949eb5e4a3b2a699303831393437.html>
- Risya, Umami dan Nurodin, Idang. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6 (11). pp. 74-80. ISSN 2088-6969
- Ryan Bakry, Mohammad. 2010. "IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA." : 56–94.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Maju. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)." *Jurnal Ilmiah Kohesi* 4(2): 59–73.
- Sukmawati, Fitri, and Alfi Nurfitriani. 2019. 2 Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM *PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, W. 2014. *Akuntansi Desa - Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Umami R., Nurodin I. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, Edisi 11.
- Utami, Kurnia, and Efrizal Syofyan. 2013. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik." 1(1): 63–86.

Wiratna, Surjaweni. 2014. *Sistem Akutansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

